

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu keberlanjutan menjadi perhatian dalam dunia bisnis, termasuk di Indonesia. Perusahaan dituntut tidak hanya untuk memperoleh *profit*, tetapi perusahaan wajib mempunyai tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan di tengah-tengah keberadaan masyarakat sekitar. Pendekatan ini disebut dengan konsep *triple bottom line* yang mencakup *profit, people, planet* (Elkington, 1997 dalam Apriliyani et al., 2021). Prinsip ini mencerminkan tuntutan terhadap dunia usaha untuk menerapkan prinsip tanggung jawab sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip ini adalah penyusunan laporan keberlanjutan atau *sustainability report*, yang digunakan untuk mengkomunikasikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan secara transparan kepada pemangku kepentingan.

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* menjadi instrumen penting dalam menilai kepatuhan dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Laporan ini menjadi sarana untuk mempresentasikan kinerja perusahaan dalam tiga dimensi yaitu: sosial, lingkungan, ekonomi. Namun dalam implementasinya, penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan keberlanjutan masih belum optimal. Apriliyani et al., (2021) menemukan bahwa aspek sosial merupakan bagian yang paling sedikit diungkapkan dibandingkan aspek ekonomi dan aspek lingkungan di dalam laporan perusahaan.

Perusahaan dan masyarakat saling bergantung satu sama lain, sehingga penting bagi perusahaan untuk membentuk dan menjaga hubungan yang harmonis dengan penduduk sekitar. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan perlu menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan sosial serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar. Bentuk tanggung jawab sosial yang diberikan entitas bisnis kepada penduduk sekitar dan lingkungan ini disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Priyo & Haryanto, 2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar tempat perusahaan berada (Anatan, 2010). Tanggung jawab tersebut bermacam-macam bentuknya, yaitu melakukan kegiatan yang dapat membuat masyarakat sejahtera, memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak tidak mampu, melakukan pemeliharaan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, dan memberi sumbangan fasilitas sosial yang berguna bagi masyarakat.

Standar yang digunakan dalam pelaporan keberlanjutan secara global adalah *Global Reporting Initiative (GRI)*. GRI merupakan suatu pedoman yang dipakai untuk mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial kegiatan usahanya kepada pemangku kepentingan. GRI bertujuan untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis, sekaligus menyediakan informasi yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh seluruh pihak terkait (Gutama & Sisdianto, 2024).

Selain GRI, kerangka global yang juga penting adalah OECD melalui *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct* (OECD, 2023). Pedoman ini menegaskan bahwa perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola. OECD menekankan penerapan *risk-based due diligence* sebagai instrumen utama agar

perusahaan mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi konsekuensi merugikan yang timbul dari mekanisme produksi global yang mempengaruhi penduduk sekitar maupun lingkungan. Selain itu, OECD juga menekankan transparansi melalui pengungkapan informasi non keuangan, termasuk kebijakan, praktik, dan hasil kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan cakupan yang luas, mulai dari hak asasi manusia, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, anti korupsi, hingga perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan moral, tetapi juga sebagai alat ukur tata kelola global yang dapat memperkuat daya saing perusahaan sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Bank Dunia melalui *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) menempatkan keberlanjutan sebagai inti dalam keputusan investasi global. Berdasarkan *MIGA Sustainability Report 2024*, pada tahun fiskal 2024 MIGA menyalurkan pembiayaan iklim sebesar US\$2,5 miliar, atau meningkat sekitar 66% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut dialokasikan pada 30 proyek di 22 negara yang berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari total nilai investasi yang dijamin, sekitar 38% ditujukan khusus untuk perubahan iklim, angka ini melampaui target Bank Dunia sebesar 35%. Bahkan, seluruh proyek baru yang dijalankan sudah selaras dengan *Paris Agreement* lebih cepat dari batas waktu 2025. Dari sisi kualitas, sekitar 90% proyek memperoleh penilaian “memuaskan atau lebih baik” dalam aspek sosial dan lingkungan oleh *Internal Evaluations Group*. Capaian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi sekedar wacana, melainkan telah menjadi standar internasional yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas (World Bank, 2024)

Konsistensi perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan penyajian informasi yang menggambarkan kinerja perusahaan dari perspektif ekonomi, lingkungan, dan sosial, terutama bagi pihak investor. Laporan keberlanjutan memuat kinerja keuangan maupun non keuangan. Keberadaan laporan ini dapat digunakan untuk membangun reputasi, meningkatkan nilai perusahaan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham (Wardoyo et al., 2022). Situasi ini memberikan gambaran bahwa kualitas pengungkapan CSR dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Ini menjadi bukti bahwa pengungkapan sosial bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga berdampak nyata secara finansial.

Komitmen terhadap pelaporan keberlanjutan di Indonesia diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 yang mengatur pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan, khususnya yang bergerak dalam sektor pengelolaan sumber daya alam. Regulasi ini menetapkan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan secara periodik. Kebijakan ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekedar kegiatan sukarela, melainkan sebuah kewajiban hukum dan sosial yang melekat pada operasional perusahaan.

Sektor industri berbasis sumber daya alam seperti perkebunan kelapa sawit, keberlanjutan sosial menjadi hal yang krusial. Hal ini disebabkan karena operasi perusahaan menyentuh langsung komunitas lokal dan pekerja yang terlibat secara intensif dalam proses produksinya. Temuan yang dilaksanakan oleh Nurharjanti et al., (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sektor perkebunan sudah memakai ketentuan GRI dalam laporan mereka, masih terdapat indikator sosial yang belum diungkapkan secara maksimal. Hal ini menjadikan sektor ini sebagai sorotan dalam pengungkapan CSR, terutama dalam aspek sosial.

Pelaporan tanggung jawab sosial dalam industri kelapa sawit menunjukkan perbedaan antara perusahaan satu dengan lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh

berbagai faktor seperti komitmen perusahaan, tekanan pemangku kepentingan, dan kesiapan sistem pelaporan. Dalam beberapa kasus, perusahaan telah menerapkan standar GRI dengan cakupan pengungkapan sosial yang cukup luas, sedangkan perusahaan lainnya menunjukkan keterbatasan dalam penyampaian informasi.

Kesadaran global mengenai pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan telah memberikan pengaruh terhadap isi serta struktur laporan keuangan. Informasi yang disajikan tidak lagi terbatas pada pencapaian keuntungan, melainkan juga memuat dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan usaha. Perubahan ini mendorong perlunya penyesuaian dalam praktik akuntansi agar mampu menampung informasi non-keuangan yang kini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan bagi investor dan pihak regulator (Edward, 2025).

Laporan Keberlanjutan dalam kerangka IFRS S1 merupakan bagian dari laporan keuangan umum yang bertujuan menyampaikan informasi mengenai risiko dan peluang keberlanjutan yang secara wajar dapat mempengaruhi prospek ekonomi suatu entitas. Laporan ini mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola isu keberlanjutan melalui empat elemen utama, yaitu: sistem pengelolaan, perencanaan, pengendalian risiko, serta penetapan ukuran dan sasaran yang digunakan. Informasi yang disajikan harus relevan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena akan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan pihak berkepentingan lainnya. IFRS S1 juga menekankan pentingnya hubungan perusahaan dengan pihak-pihak dalam rantai nilai seperti tenaga kerja, komunitas, dan mitra usaha, yang semuanya memiliki potensi mempengaruhi arus kas, akses pembiayaan, dan biaya modal perusahaan dalam jangka pendek hingga jangka panjang (IFRS, 2023).

Keberadaan perusahaan kelapa sawit anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) memiliki posisi strategis dalam industri ini. GAPKI sebagai asosiasi industri nasional memiliki anggota yang tersebar luas dan secara kolektif mewakili wajah industri kelapa sawit Indonesia. Pengungkapan tanggung jawab sosial oleh anggota GAPKI menjadi penting untuk diamati karena mencerminkan bagaimana prinsip keberlanjutan diterapkan dalam skala yang lebih luas di sektor ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *sustainability* pada aspek sosial dan keterkaitannya terhadap kinerja keuangan perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif eksploratif dengan acuan standar POJK Nomor 51, untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik dan praktik bisnis dalam mengintegrasikan nilai sosial ke dalam strategi keberlanjutan perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada pembahasan diatas, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan keberlanjutan aspek sosial pada perusahaan yang tergabung di GAPKI periode 2021-2023?
2. Bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan seiring dengan pengungkapan aspek sosial diungkapkan periode 2021-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis penerapan keberlanjutan aspek sosial pada perusahaan yang tergabung di GAPKI periode 2021-2023.

2. Untuk menganalisis kondisi kinerja keuangan perusahaan seiring dengan pengungkapan aspek sosial diungkapkan periode 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan, khususnya pengungkapan aspek sosial, untuk mendukung kualitas pelaporan dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan.
2. Memberikan informasi bagi investor mengenai aspek sosial dalam laporan keberlanjutan, sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan investasi.
3. Mendukung pengembangan kebijakan yang mendorong perusahaan, khususnya sektor kelapa sawit, untuk menjalankan operasional bisnis yang berkesinambungan dan bertanggung jawab secara sosial.
4. Menjadi bahan dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi untuk memperkaya materi perkuliahan dan meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar sehingga kualitas pembelajaran meningkat.